

Identifikasi Tingkat Kekumuhan Pemukiman di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung

Rahmat Hidayat*, Aan Julia, SE., M.Si

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rachmathernandez@gmail.com, mutiah_aan@yahoo.com

Abstract. This research was conducted with the aim of identifying the level of slums that occur in Sukahaji Village, Bandung City, using qualitative methods and analytical methods using data triangulation and observation and interviews with informants in Sukahaji Village. The informants in this research are representatives from each RW and the Head of the Economic Section. and Development of Sukahaji Village. Then data processing was carried out along with classification of each RW in Sukahaji Village, Bandung City. The results of this research show that of the 10 RWs in Sukahaji sub-district, 5 RWs are indicated to be in slum areas, and in accordance with what is said, Sukahaji Sub-district, Bandung City is included in the slum area category.

Keywords: *Identify the Level of Slums*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan yang terjadi di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung, menggunakan metode kualitatif dan dengan metode analisis menggunakan triangulasi data dan observasi serta wawancara terhadap informan di Kelurahan Sukahaji, Informan pada penelitian ini merupakan Perwakilan dari setiap RW dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sukahaji. Kemudian dilakukan pengolahan data beserta pengklasifikasian tiap RW yang ada di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 RW yang terdapat di kelurahan Sukahaji 5 RW terindikasi masuk dalam kawasan kumuh, dan sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa Kelurahan Sukahaji Kota Bandung masuk kedalam kategori kawasan kumuh.

Kata Kunci: *Identifikasi Tingkat Kekumuhan*

A. Pendahuluan

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk di wilayah suatu kota yang semakin meningkat, maka meningkat pula tekanan ekonomi, sosial serta lingkungan hidup di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa 54% penduduk sudah tinggal di wilayah kota dan pada tahun 2050 jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 66%. Hal itu secara langsung membentuk kawasan kota menjadi pusat konsentrasi populasi penduduk, interaksi sosial budaya, dampak lingkungan dan kemanusiaan, dampak ekonomi serta urbanisasi (Kementerian PUPR, 2017).

Wilayah perkotaan adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang menyumbang sekitar 60 persen dari PDB global. Namun, mereka juga menyumbang sekitar 70 persen emisi karbon global dan lebih dari 60 persen penggunaan sumber daya. Urbanisasi yang cepat mengakibatkan bertambahnya jumlah penghuni daerah kumuh, infrastruktur dan layanan yang tidak memadai dan terbebani (seperti pengumpulan sampah dan sistem air dan sanitasi, jalan dan transportasi), polusi udara yang memburuk, dan perluasan kota yang tidak terencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, 150 negara telah mengembangkan rencana perkotaan nasional, dengan hampir setengahnya dalam tahap implementasi. Memastikan bahwa rencana tersebut dilaksanakan dengan baik akan membantu kota tumbuh dengan cara yang lebih berkelanjutan dan inklusif (2). Dengan demikian, maka sangat dibutuhkan suatu cara mengelola perkembangan kawasan kota menjadi lebih berkelanjutan.

Isu tentang permasalahan kota dan pemukiman berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. SDG's itu sendiri adalah agenda 2030 yang berisi kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs mempunyai prinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut *No One Left Behind*. Salah satu tujuan SDGs yang berkaitan dengan isu permasalahan kota dan pemukiman adalah tujuan SDGs nomor 11, dimana, mewujudkan kota menjadi daerah bebas kawasan kumuh merupakan salah satu target dalam pencapaian target SDG's 11 ini. Tujuan dari SDG's 11 yang dikutip dari lampiran peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu tujuan SDG's 11 yang ber-isi 'Menjadikan Kota Dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, Dan Berkelanjutan'. Direktorat Jenderal Cipta Karya menargetkan pembangunan kawasan permukiman yang bertajuk 100-0-100, yang diartikan terpenuhinya 100% akses pelayanan air minum; 0% permukiman kumuh di perkotaan; dan 100% akses sanitasi layak di akhir tahun 2019 yang sejalan dengan program permukiman berkelanjutan (4).

Perkembangan wilayah di Indonesia cenderung terlihat dengan ciri pertumbuhan penduduk seperti halnya negara-negara berkembang lainnya berlangsung dengan sangat pesat. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mempunyai kontribusi yaitu meningkatnya permintaan penyediaan sarana dan prasarana yang baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Permasalahan kawasan kumuh merupakan permasalahan yang umum terjadi di kota besar, sedangkan jumlah ketersediaan lahan untuk pemukiman yang tetap menyebabkan pada lokasi pemukiman yang berdekatan dengan pusat kegiatan akan menimbulkan beberapa titik konsentrasi pemukiman hunian yang padat dan terkesan kumuh (5).

Rumah dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah kebutuhan dasar manusia dan hak warga Negara Indonesia. Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan menjadi kewajiban Pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah untuk bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui pelaksanaan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk (1) Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan manusia; (2) Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur.

Menurut hasil perhitungan pengeluaran luasan pemukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya bahwa pada tahun 2016 terdapat 35.291 hektar

pemukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, didapati bahwa pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat masuk ke dalam 5 (lima) besar propinsi yang memiliki rumah tangga kumuh perkotaan terbanyak di Indonesia dengan menempati urutan keempat yakni sebesar 19.86% setelah propinsi DKI Jakarta, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (7).

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi kota terbesar ke-4 (empat) dengan jumlah penduduk 2,490,066 juta orang yang tersebar pada wilayah seluas 167,67 Hektar. Kota Bandung merupakan kota wisata yang menjadi objek untuk dikunjungi wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan dari luar negeri. Sebagai kota besar dan kota wisata tentunya banyak faktor pendukung dan faktor penghambat salah satunya tata kota atau tata wilayah, yang menjadi sebuah tantangan bagi kota wisata untuk mengelolanya dengan baik. Dalam tata ruang kota dan wilayah, pertumbuhan pemukiman kumuh merupakan sebuah tantangan urbanisasi saat ini (8).

Pemukiman kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi faktor terbesar penyumbang wilayah Kota Bandung, tercatat jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandung mencapai 5.065 rumah. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), jumlah RTLH pada 2020 tercatat mencapai 6.541 rumah. Jumlah ini berkurang sebanyak 969 menjadi 5.572 RTLH yang telah ditangani oleh Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2021, jumlah RTLH mengalami peningkatan menjadi 5.985 rumah. Meskipun di tahun tersebut Pemerintah Kota Bandung telah menangani 920 rumah sehingga RTLH yang tersisa menjadi 5.064 rumah. Ada 7 (tujuh) kecamatan yang mencatat jumlah RTLH paling tinggi di Kota Bandung. Ketujuh wilayah ini mencatat ada 300-400 rumah tak layak huni masih ditempati warga di Kota Bandung (8).

Pemerintah Kota Bandung menargetkan pengentasan kawasan kumuh yang bisa diatasi sebesar 2,71% pada tahun 2023. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Kota Bandung selaku lembaga yang menjalankan program tersebut menyatakan target 2.71% merupakan hasil perhitungan. DPKP tidak menargetkan 100% penentasan kawasan kumuh bisa teratasi karena beberapa faktor penghambat dan lokasi yang tidak bisa diintervensi. Terdapat beberapa kendala dalam penargetan tersebut, salah satu kendala yang cukup besar adalah lokasi pemukiman warga yang menempati lahan-lahan negara. Seperti lokasi pemukiman disepadan sungai, di lahan dekat rel kereta api milik PT KAI, hingga lokasi pemukiman di tanah milik TNI AU di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Dampak dari lokasi-lokasi pemukiman milik negara ini tidak bisa diintervensi oleh Pemkot Bandung, selain itu warga dilokasi tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan dari program Rutilahu karena kebanyakan warga di lokasi tersebut tidak memiliki sertifikat tanah pribadi yang menjadi persyarat utama bantuan Rutilahu. Rutilahu itu sendiri merupakan program bantuan rehab rumah tidak layak huni untuk warga di pemukiman kumuh.

DPKP memastikan penanganan kawasan kumuh di Kota Bandung akan terus dilakukan, Disisi lain Pemkot Bandung pada tahun 2019 sempat menyambet penghargaan dalam program tersebut dari PEMPROV Jabar karena berhasil mengentaskan 717 Hektare kawasan kumuh.

Perlu diketahui, ada 10 kelurahan dengan luasan wilayah kumuh paling tinggi di Kota Bandung. Di antaranya:

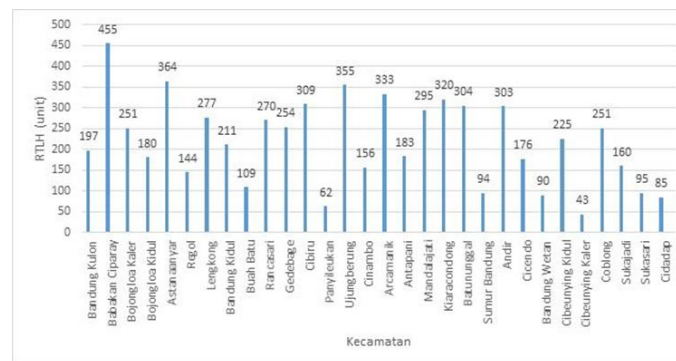
Tabel 1. Data Luas Wilayah Kumuh 10 Kelurahan di Kota Bandung

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Hektare)
1.	Sukaraja	Cicendo	37,43
2.	Ciumbuleuit	Cidadap	33,54
3.	Sukahaji	Babakan Ciparay	30,85
4.	Cijerah	Bandung Kulon	17,528
5.	Babakan	Babakan Ciparay	17,41
6.	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	15,82

No	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Hektare)
7.	Pajajaran	Cicendo	15,64
8.	Kopo	Bojongloa Kaler	13,302
9.	Pasirwangi	Ujungberung	10,987
10.	Jamika	Bojongloa Kaler	10,41

Sumber : detik.com 2023

Peneliti Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat 10 kelurahan dari 7 kecamatan yang terdata sebagai kawasan kumuh dengan yang terbesar seluas 37,43 Hektare di kelurahan Sukaraja dan yang terkecil di kelurahan Jamika dengan luas 10,41 Hektare. Ada satu kecamatan yang di wilayah nya terdata 3 kelurahan yang masuk kategori kawasan kumuh yaitu kecamatan Babakan Ciparay. Dari total 10 kelurahan yang terdata sebagai kawasan kumuh, Kelurahan Sukahaji yang terletak di Kecamatan Babakan Ciparay memiliki RTLH dengan jumlah RTLH terbanyak yaitu sebanyak 323 unit. Dimana Kecamatan Babakan Ciparay menjadi kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak dengan jumlah RTLH 455 unit. Atau 71% RTLH Kecamatan Babakan Ciparay berada di Kelurahan Sukahaji (Alhamidi, 2022).



Sumber: datartlh.perumahan.pu.go id

Gambar 1. Diagram Jumlah RTLH di setiap Kecamatan Kota Bandung

Fenomena kawasan kumuh di kota Bandung yang tidak mengalami perubahan secara signifikan ini, menunjukkan perlunya suatu strategi untuk program pengentasan kawasan kumuh tersebut. Strategi tersebut bisa dilakukan dari tingkat lembaga terkecil yaitu kelurahan sampai tingkat lembaga terbesar yaitu pemerintah pusat.

Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai “**Identifikasi Tingkat Kekumuhan Pemukiman Di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung**” yang berkaitan dengan program dan strategi pengentasan kawasan kumuh serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam program pengentasan kawasan kumuh di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis pendekatan kualitatif dan triangulasi data. Metode penelitian ini digunakan sebagai alat ukuran menentukan tingkat kekumuhan dalam mengidentifikasi tingkat kekumuhan pemukiman di Kelurahan Sukahaji dengan berdasarkan 7 indikator kumuh dari Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, yaitu diantaranya Bangunan Gedung, Kondisi Jalan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Sanitasi, Pengelolaan Sampah, dan Pengamanan Kebakaran. Menentukan tingkat kekumuhan di kelurahan Sukahaji,

1. Pemberian skor setiap sub kriteria, berdasarkan parameter penilaian:

- Kualitas Baik (0% – 25%) : Skor 0
- Kualitas Cukup Baik (26% – 50%) : Skor 1
- Kualitas Buruk (51% – 75%) : Skor 3

- Kualitas Sangat Buruk (76% – 100%) : Skor 5
2. Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan menggunakan rumus sebagai berikut

$$S_i = \frac{\sum B_i}{\sum P}$$

Keterangan :

S_i = Total Skor pada Setiap Indikator, B_i = Skor

Sub Kriteria, P = Jumlah Sub Kriteria

3. Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Berikut merupakan rentang nilai tingkat klasifikasi yang didapatkan untuk setiap kelas yakni:

- Bukan Kawasan Kumuh : 0 – 8,75
- Kawasan Kumuh Ringan : 8,76 – 17,50
- Kawasan Kumuh Sedang : 17,51 – 26,25
- Kawasan Kumuh Berat : 26,26

(5)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tingkat Kekumuhan Kelurahan Sukahaji

Dari hasil survey yang telah dilakukan peneliti di dapatkan poin dari semua tiap sub kriteria yang nantinya akan di jumlahkan dan di rata-ratakan untuk mendapatkan klasifikasi kawasan kumuh yang dimiliki Kelurahan Sukahaji.

Tabel 4. 1 Hasil Observasi Kekumuhan Kelurahan Sukahaji

Kelurahan	JUMLAH SKOR							TOTAL
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	
Pak Bondan	3	0.5	0	0.5	0	0	0	4.00

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Dapat dilihat dari Tabel 4.1, skor mengenai tingkat kekumuhan yang didapatkan dari hasil observasi dengan informan Pak Bondan sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Sukahaji, diperoleh total nilai skor sebesar 4.00 dari keseluruhan indikator. Menurut Pak Bondan, selama 2 (dua) tahun dari 2022 sampai 2023 telah dilakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 103 unit. Tetapi, program perbaikan RTLH dari program RUTILAHU tidak menurunkan nilai tingkat kekumuhan di Kelurahan Sukahaji. Hal tersebut terjadi karena RUTILAHU tidak termasuk ke dalam unsur pengurangan kawasan kumuh, tetapi yang termasuk unsur pengurangan kawasan kumuh yaitu Kualitas Jalan, Saluran Air Hujan, Sarana Pemadam Kebakaran, Sumber Air Bersih, Tata Letak Bangunan dan Sanitasi. Walau demikian, Pada tahun 2023 Kelurahan Sukahaji mendapat nilai tertinggi untuk pengurangan kawasan kumuh, yaitu sebesar 2,1% pengurangan luas kawasan kumuh.

Tabel 4. 2 Hasil Klasifikasi Kekumuhan Kelurahan Sukahaji

TOTAL SKOR	KLASIFIKASI
4.00	Bukan Kawasan Kumuh

Sumber: Hasil Observasi (2024)

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sukahaji masuk kedalam klasifikasi Bukan Kawasan Kumuh dengan hasil perhitungan rata-rata skor sebesar 4.00.

Analisis Pembahasan Identifikasi Kondisi Kawasan Kumuh

Dengan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti di dapatkan poin dari semua tiap sub kriteria yang nantinya akan di jumlahkan dan di rata-ratakan untuk mendapatkan klasifikasi kawasan kumuh yang dimiliki Kelurahan Sukahaji yang diindikasikan kumuh pada RW 01, RW 02, RW 03, RW 04 dan RW 05.

Tabel 4. 3 Jumlah Hasil Skor Observasi Kelurahan Sukahaji

RW	JUMLAH SKOR							TOTAL
	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	
01	3	1.5	2.5	5	2.5	0	5	19,5
02	2	2	0	2	1.5	0	1.5	9
03	1.5	3	5	3	5	0	3	20.5
04	2	1.5	0.5	0.5	2.5	0	0	7
05	4	4	3	3	4	1	5	24

Sumber: Hasil olah data peneliti

Tingkat kekumuhan beserta identifikasi berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap narasumber yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 Dari hasil klasifikasi diperoleh hasil yaitu, 5 RW berindikasi kawasan kumuh, teridentifikasi 4 kawasan kumuh ringan dan 1 lokasi sisanya terindikasi bukan kawasan kumuh.

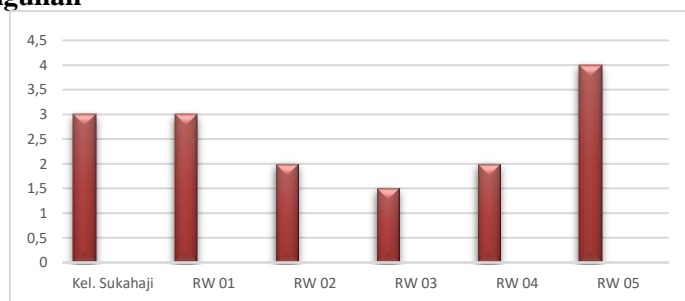
Tabel Klasifikasi Tingkat Kumuh Kelurahan Sukahaji

RW	Total Skor	Klasifikasi
01	19.5	Kawasan Kumuh Sedang
02	9	Kawasan Kumuh Ringan
03	20.5	Kawasan Kumuh Sedang
04	7	Bukan Kawasan Kumuh
05	24	Kawasan Kumuh Sedang

Sumber: Hasil olah data peneliti

Dari hasil pengklasifikasian 5 RW yang berada di Kelurahan Sukahaji yang terindikasi kumuh di dapatkan dari tabel 4.3 bahwa RW 01, RW 03, dan RW 05 berada pada kawasan kumuh sedang, kemudian RW 02 kawasan kumuh ringan dan RW 04 berada pada bukan kawasan kumuh.

Analisis Kondisi Bangunan

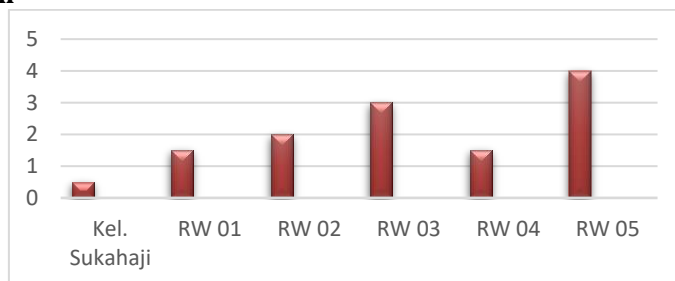


Gambar 2. Grafik Skor Kondisi Bangunan

Dari hasil survei yang sudah dilakukan bahwa bangunan di Kelurahan Sukahaji didominasi oleh bangunan yang semi permanen karena dibangun dengan bahan material bata dan partisi bangunan kolom praktis material temporer, namun dengan lahan yang sempit kondisi tata masa bangunan di lokasi penelitian bahwa sebagian besar bangunan tempat tinggal tidak

berdasarkan standar layak bangunan tempat tinggal dan termasuk kedalam kriteria kawasan kumuh hal tersebut di karenakan kawasan sukahaji RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 dan RW 5 berada di kawasan sengketa lahan yang menyebabkan tidak bisa di sentuh oleh pembangunan sesuai perundang undangan yang berlaku.

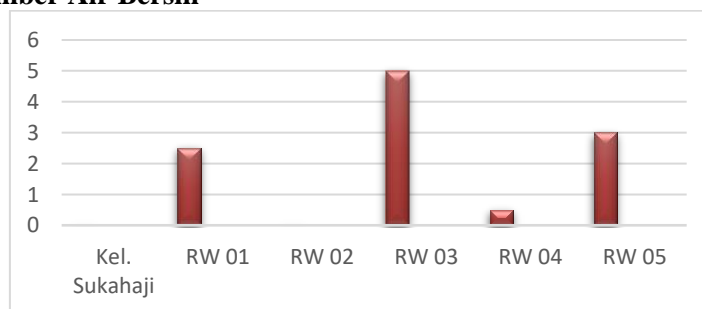
Analisis Kondisi Jalan



Gambar 1. Grafik Skor Kondisi Jalan

Kondisi jalan pemukiman di Kelurahan Sukahaji cukup baik dengan menggunakan bahan material aspal dan lebar jalan sekitar 1 - 1,5 meter, kekurangannya yaitu jalan yang kecil dengan kapasitas maksimum 1 mobil, akibatnya jalan menjadi macet jika ada berlawanan arah dan berpasasan kemudian mayoritas jalan di Kelurahan Sukahaji tidak memiliki bahu jalan.

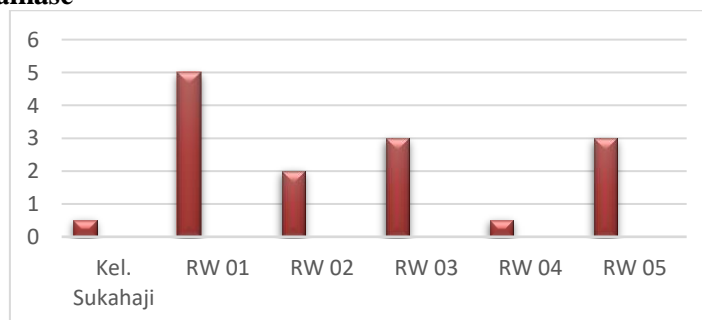
Analisis Kondisi Sumber Air Bersih



Gambar 4. Grafik Skor Penyediaan Air

Diketahui sumber air bersih di kawasan Kelurahan Sukahaji memiliki air bersih yaitu berupa PDAM tetapi ada beberapa fasilitas air bersih juga seperti 4 sumur yang dimiliki Kelurahan Sukahaji. Sehingga masyarakat/penduduk di wilayah tersebut banyak yang menggunakan sumur galian sebagai air bersih untuk mendukung aktifitas rumah tangga. Untuk itu masyarakat dapat mengakses kualitas air bersih dan akses air minum yang aman.

Analisis Kondisi Drainase

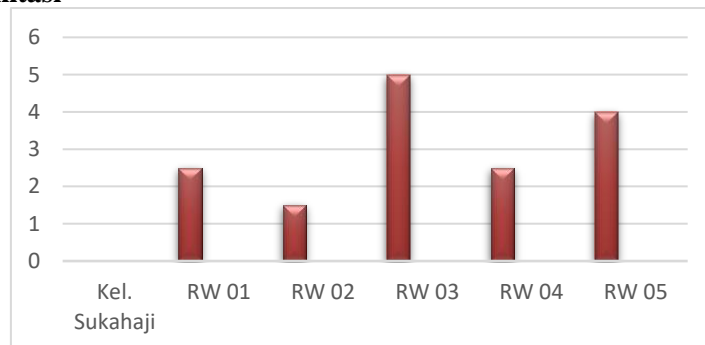


Gambar 5. Grafik Skor Drainase Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi di kawasan Kelurahan Sukahaji ini memiliki drainase. Drainase yang ada disana memiliki fungsi yang berbeda – beda. Namun ada drainase yang sebagian yang tidak berbentuk tembok, ada drainase yang material (semen) terkelupas, dan juga ada drainase yang tidak bekerja dengan baik atau menggenang akibat kebiasaan masyarakat yang

buruk membuang sampah sembarangan membuat drainase tersebut rusak. Sehingga masih terjadi genangan air dan banjir limpasan saat terjadi hujan dalam waktu singkat air sudah turun.

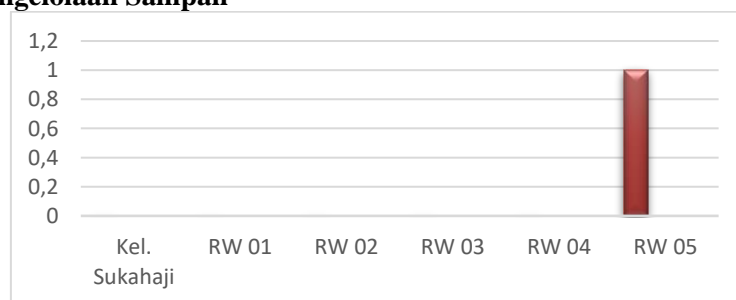
Analisis Kondisi Sanitasi



Gambar 6. Skor Kondisi Jalan

Berdasarkan hasil observasi tentang sanitasi seperti, limbah industri rumah tangga dan limbah rumah tangga sehingga masyarakat/penduduk di Kelurahan Sukahaji yang memberikan kesempatan untuk peneliti bertanya menyangkut dengan proses air limbah rumah tangga di kawasan tersebut masih banyak yang menggunakan selokan sebagai tempat pembuangan air limbah dari rumah tangga tersebut.

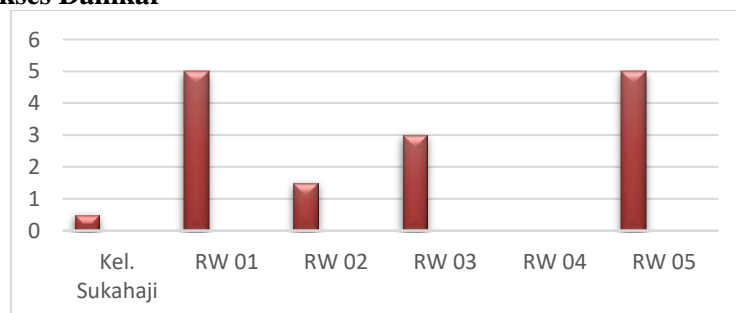
Analisi Kondisi Pengelolaan Sampah



Gambar 7. Grafik Kondisi Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil dari observasi penelitian maka diketahui tentang sampah di selokan dan tempat sampah ada di Kelurahan Sukahaji dan sekitarnya. Pengelolaan sampah Kelurahan Sukahaji cukup memiliki sistem yang baik dengan pengangkutan sampah yang teratur memiliki tim khusus yaitu GOBER dari kelurahan yang setiap hari mengambil sampah dari lingkungan Kelurahan Sukahaji ke TPS Sukahaji dan juga memiliki prasarana TPS Sukahaji yang cukup untuk menampung sampah rumah tangga yang di hasilkan oleh masyarakat Kelurahan Sukahaji.

Analisis Kondisi Akses Damkar



Gambar 8. Grafik Skor Kondisi Pengaman Kebakaran

Berdasarkan hasil dari observasi yang peneliti lakukan Kelurahan Sukahaji memiliki sistem pengamanan untuk mencegah kriminalitas yang terjadi dengan adanya poskamling dan linmas yang bertugas. Maka dari itu Kelurahan Sukahaji cukup aman dari Tindakan kriminalitas

yang terjadi. Kemudian untuk sistem pengamanan kebakaran Kelurahan Sukahaji ada beberapa kawasan yang sulit di jangkau oleh pemadam kebakaran dengan memasuki gang yang cukup sempit akses mobil damkar sulit untuk menjangkau.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi Kelurahan Sukahaji didapatkan hasil kesimpulan. Kelurahan Sukahaji memiliki 10 RW yang terindikasi kumuh yaitu 5 RW, dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala seksi ekonomi dan pembangunan kelurahan Sukahaji diperoleh nilai 4 yang artinya bukan termasuk kawasan kumuh, tetapi hasil dari tiap informan yang berada pada RW yang berindikasi kawasan kumuh, terdapat RW 01 bernilai 19.5, RW 03 bernilai 20.5 dan RW 05 bernilai 24, maka dari itu ketiga RW tersebut masuk kedalam klasifikasi kawasan kumuh sedang. untuk RW 02 bernilai 9 masuk kedalam klasifikasi kawasan kumuh ringan, dan RW 04 bernilai 7 masuk kedalam klasifikasi bukan kawasan kumuh. Dari hasil pengklasifikasian tersebut terbukti bahwa 7 indikator kawasan kumuh yaitu Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Sampah dan Keamanan Kebakaran, sesuai dengan sejumlah identifikasi observasi lapangan yang telah dilakukan dan juga hasil wawancara tiap informan yang telah di wawancarai.

Daftar Pustaka

- [1] Alhamidi, R. (2022). *5.065 Rumah di Kota Bandung Tak Layak Huni*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6150232/5-065-rumah-di-kota-bandung-tak-layak-huni>
- [2] Ervianto, W. I. (2019). Di Perkotaan Sustainable Urban Slums Management. *Jurnal Spektran*, 7(2), 178–186.
- [3] Indonesia, C. (2019). *Kawasan Kumuh Indonesia Meluas Dua Kali Lipat*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903212554-20-427289/kawasan-kumuh-indonesia-meluas-dua-kali-lipat>
- [4] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. *MPU Dan PRRI*, 14, 1–43
- [5] Nations, U. (2017). *The Sustainable Development Goals Report 2022*. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/>
- [6] Perkim. (2020). *Rumah Sehat: Apakah Bisa Dilakukan Untuk Rumah Swadaya?* <https://perkim.id/perumahan/rumah-sehat-apaakah-bisa-dilakukan-untuk-rumah-swadaya/>
- [7] Suherman, S. . (2009). *Made In Bandung*. DAR! Mizan
- [8] Afifah Rizkia, Ria Haryatiningsih. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Kota Besar di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 2023 Dec 23;125–32.
- [9] Adellia Nur Fadhilah, Yuhka Sundaya. Analisis Ekonomi Pekerja Migran Indonesia dalam Memilih Negara Tujuan pada BP3MI Jabar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 2023 Dec 23;111–6.